Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 13290-13300

Provinsi Sulawesi Barat dalam Bayang Kemiskinan dan Stunting: Dampaknya terhadap Pembangunan Manusia

Adhis Darussalam Pamungkas[1], Maria Assumpta Wikantari[2], Rouse Riyadi Putri [3], Albertus Maria Setyastanto[4], Ari Wahyu Leksono[5]
[1,3,4,5] Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI
[2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Corresponding Author: Adhis Darussalam Pamungkas, e-mail: adhis.darussalam.pamungkas@gmail.com
Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kemiskinan dan stunting dipandang sebagai dua faktor utama yang dapat menghambat peningkatan IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan dan prevalensi stunting terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018–2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, prevalensi stunting juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM. Secara simultan, kedua variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi tingkat IPM di Provinsi Sulawesi Barat. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi prevalensi stunting guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh di daerah tersebut.

Kata Kunci: Kemiskinan, Prevalensi Stunting, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is an important indicator for measuring a community's quality of life, encompassing aspects of education, health, and a decent standard of living. Poverty and stunting are considered two major factors that can hinder the improvement of the Human Development Index (HDI). This study aims to analyze the influence of poverty and stunting prevalence on the Human Development Index (HDI) in West Sulawesi Province from 2018 to 2023. The method used in this study is multiple regression. The analysis was conducted using a multiple regression model to test the influence of each variable on the HDI. The results show that poverty has a negative and significant effect on the Human Development Index. Meanwhile, stunting prevalence also has a significant negative effect on the HDI. Simultaneously, these two variables jointly influence the HDI level in West Sulawesi Province. These findings emphasize the importance of government policies to reduce poverty and stunting prevalence to improve the overall quality of human development in the region.

Keywords: Poverty, Stunting Prevalence, Human Development Index

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan IPM sebagai indikator yang esensial untuk mengukur keberhasilan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, sekaligus menjadi data strategis yang mencerminkan kinerja pemerintah serta berperan dalam Dana Alokasi Umum (DAU), dengan mencangkup dimensi kesehatan, Pendidikan, dan standar hidup layak yang terangkum dalam satu angka

tunggal. Dalam Human Development Report 2023/2024 yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia berada di angka 112 dunia. Pada skala Asia, Indonesia berada di urutan ke-18. Sementara skala Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-6, di atas Filipina, dibawah Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023) mencatat, IPM di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0.84% dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 73,77 poin. Kenaikan IPM pada 2023 sudah termasuk lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2018-2023. Pembangunan kualitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas baik fisik, akal, dan batin sehingga dengan adanya pembangunan kualitas manusia bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk industri-industri yang ada sehingga berdampak baik pada peningkatan pendapatan suatu industri dan juga perekonomian Indonesia (Syahputra & Sitohang, 2024).



Gambar 1. Presentase IPM Terendah Di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lain di Pulau Sulawesi. Di bagian utara, wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan di sisi selatan dan timur, provinsi ini bersinggungan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedekatan geografis ini menjadikan hubungan antar provinsi berlangsung cukup dinamis, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Sementara itu, bagian barat Provinsi Sulawesi Barat tidak berbatasan langsung dengan daratan Kalimantan, melainkan dengan wilayah perairan yang dikenal sebagai Laut Makassar. Laut ini menjadi salah satu jalur pelayaran penting serta kawasan yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Keberadaan Laut Makassar memberikan nilai strategis tersendiri bagi Sulawesi Barat, khususnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta pengembangan sektor ekonomi berbasis maritim. Namun, pada tahun 2023, IPM Sulawesi Barat tercatat sebesar 67,55, menempatkan di posisi ke-31 dari 34 provinsi. Ini menunjukan bahwa meskipun ada peningkatan dalam IPM secara nasional, Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan dalam pembangunan manusia. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia terus dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama masalah kemiskinan yang kini menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia. IPM yang rendah merupakan salah satu penyebab kemiskinan (Sari et al., 2022). IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, ketika nilai IPM

di suatu wilayah tinggi, maka idealnya kualitas hidup masyarakat juga akan lebih baik dan tingkat kemiskinan juga rendah (Khairunnisa et al., 2023).

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara martabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, Pendidikan, dan pekerjaan (Karyati & Julia, 2021). Kemiskinan mengakibatkan keluarga tersebut mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemiskinan pada dasarnya dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BM Lukita & Bonanio, 2023). Kemiskinan dinilai mempunyai peran penting yang bersifat timbal balik sebagai sumber permasalahan gizi yakni kemiskinan menyebabkan kekurangan gizi sebaliknya individu yang kekurangan gizi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses kemiskinan (Dja'far et al., 2024).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki sifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi kehidupan, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara holistik dan menyeluruh. Upaya pengentasan kemiskinan harus mencakup berbagai sektor dan aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara luas dan terpadu (Terisha et al., 2023). Masalah ini masih menjadi tantangan yang dihadapi di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lain di Pulau Sulawesi. Di sebelah utara, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, di bagian selatan dan timur, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga provinsi ini memiliki hubungan geografis yang cukup erat karena berada dalam satu gugusan pulau yang sama, sehingga interaksi antardaerah cukup intens, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya.

Di sisi barat, Sulawesi Barat tidak berbatasan langsung dengan daratan Kalimantan seperti Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan, melainkan berbatasan dengan perairan Laut Makassar. Laut ini berperan penting sebagai jalur transportasi laut dan juga sebagai kawasan potensial dalam sektor kelautan dan perikanan. Posisi geografis ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam hal konektivitas antarwilayah dan potensi pengembangan ekonomi maritim. Hal tersebut belum mampu menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, presentasenya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Kemiskinan Kabupaten Sulawesi Barat tahun 2018 – 2023

No	Kabupaten	Persentase Kemiskinan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Majene	13.79%	13.72%	13.73%	14.34%	15.13%	14.54%
2	Polewali Mandar	15.97%	15.60%	15.26%	15.68%	16.39%	16.08%

3	Masama	13.38%	13.42%	13.38%	13.77%	14.51%	14.31%
4	Mamuju	7.18%	7.06%	6.92%	7.46%	7.63%	7.57%
5	Pasangkayu	4.53%	4.28%	4.48%	4.77%	5.09%	4.79%
6	Mamuju Tengah	7.14%	6.28%	6.79%	7.13%	7.17%	7.32%
	Jumlah	61.99%	60.39%	60.56%	63.19%	65.92%	64.61%

Sumber: data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018-2023 berkembang secara tidak stabil. Pada tahun 2018 tingkat keseluruhan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 61.99% pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dengan mencapai 60.56% pada tahun 2021 dan 2022 terus meningkat hingga mencapai 65.92% dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 64.61%. Penyebab turunnya tingkat kemiskinan itu tidak terlepas dari program kemiskinan yang dilakukan pemerintah seperti Bantuan Sosial, Program Pemberdaya Ekonomi, Akses Pendidikan dan Kesehatan.

Dampak lain yang muncul beriringan dengan kemiskinan adalah stunting. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting pada balita nasional sebesar 21,5% turun 0,1 persen dari tahun 2022 sebesar 21.6% dengan kasus tertinggi di antara anak berusia 24-35 bulan. Percepatan penurunan stunting pada anak balita merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Dilansir dari KSNRI (Kementerian Seketariat Negara Republik Indonesia) pemerintah memandang bahwa sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting .

Pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan yang memadai, pendidikan bagi orang tua tentang gizi dan perawatan anak, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan (Hairunis et al., 2018; Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan program-program yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini (Oktaviani et al., 2024).

Tabel 2. Persentase Stunting Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 - 2022

No	Kabupaten	Persentase Stunting			
		2018	2019	2021	2022
1	Majene	45.8%	43.9%	35.7%	40.6%
2	Polewali Mandar	38.2%	39.4%	36%	39.3%
3	Masama	43.1%	45%	33.7%	38.6%
4	Mamuju	46.4%	43.6%	30.3%	33.8%
5	Pasangkayu	34.8%	35.6%	28.6%	25.8%
6	Mamuju Tengah	41.5%	32.1%	26.3%	28.1%

Sumber: data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat

Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di daerah ini masih cukup tinggi, yang menunjukkan perlunya perhatian dan tindakan yang lebih serius. Masalah stunting ini terus menjadi tantangan di semua wilayah, termasuk Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di daerah tersebut.

Kementerian Kesehatan RI mendefinisikan stunting sebagai kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh WHO untuk usianya, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, serta faktor lingkungan dan sosial. Kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan, pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru tampak setelah bayi berumur dua tahun. Masalah tingginya anak balita (Stunting) menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia, salah satunya Sulawesi Barat yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting dapat menghambat peningkatan IPM di suatu negara/daerah karena ketidakmampuan dalam memenuhi gizi dan juga asupan lainnya karena tingginya angka pengangguran yang mengakibatkan banyaknya kemiskinan di suatu negara/daerah (Pamungkas et al., 2024).

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Lembaga atau instansi yang mempublikasikan (Sugiyono, 2018). Seluruh data keputusan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal terpublikasi, laporan dari studi terdahulu, website resmi instansi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat. Peneliti ini mengambil data populasi dari BPS Sulawesi Barat dalam kurun waktu 6 tahun yaitu 2018-2023. Sampel yang diteliti oleh peneliti adalah enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Majene, Mamuju, Masama, Polewali Mandar, Pasang Kayu, dan Mamuju Tengah. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan software Eviews1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, model regresi yang digunakan dinyatakan layak. Berikut ini adalah output uji regresi linear berganda:

Tabel 3. Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda

Variable	Coefficient
C	59.62613
X1	0.975896
X2	-0.094557

1. Nilai konstanta sebesar 59.62 adalah nilai prediksi IPM ketika kedua variabel (kemiskinan dan stunting) sama dengan nol. Meskipun secara praktis tidak ada kondisi dimana keduanya nol, nilai ini memberikan titik awal untuk interpretasi.
2. Nilai koefisien variabel kemiskinan (X1) sebesar 0.975 jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1% maka variabel IPM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.975. Menurut hasil penelitian, kemiskinan memiliki dampak yang positif namun tidak terlalu signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Sanniana Sidabutar et al., 2020; Khairunnisa et al., 2023) yang berpendapat bahwa kemiskinan tidak selalu menurunkan IPM secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena factor-faktor lain seperti program pemerintah di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat miskin, sehingga komponen IPM seperti Pendidikan dan Kesehatan dapat meningkat meskipun kemiskinan masih tinggi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kenaikan angka kemiskinan tidak selalu menyebabkan penurunan IPM. Hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai program pemerintah yang secara aktif mendukung kualitas hidup masyarakat miskin. Seperti, program Pendidikan gratis untuk keluarga kurang mampu sehingga meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, program layanan Kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuaran (PBI) sehingga meningkatnya angka harapan hidup, dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai juga berkontribusi karena mendorong keluarga miskin tetap memperhatikan pendidikan dan kesehatan.
3. Nilai Koefisien Stunting (X2) sebesar -0.094 jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1% maka variabel IPM (Y) akan turun sebesar 0.094. Nilai koefisien negatif -0,094 menunjukkan bahwa stunting menjadi penghambat peningkatan IPM di Sulawesi Barat. Dampaknya terhadap kesehatan, kognitif, dan produktivitas individu berdampak langsung pada dimensi pendidikan, pendapatan, dan harapan hidup dalam IPM. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi prioritas strategis. Beberapa daerah telah berhasil menurunkan stunting, seperti Sulawesi Selatan dengan program "Quick Wins", Lamongan dengan pola 1-10-100, dan Mojokerto melalui program DHASAT. Keberhasilan ini dicapai melalui intervensi lintas sektor, edukasi gizi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal, yang bisa diadaptasi di Sulawesi Barat untuk hasil serupa.

Hasil Uji Parsial

Tabel 4. Hasil Uji T Parsial

Variable	t-Statistic	Prob.
C	17.69282	0.0000
X1	3.491907	0.0030
X2	-4.088487	0.0009

Berdasarkan tabel, menyatakan hasil uji t (parsial) antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

a. Hasil uji t pada variabel kemiskinan (X1) diperoleh t hitung sebesar 3.491907 > t tabel yaitu 2.0738 dan nilai sig. 0.0030 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel kemiskinan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).
b. Hasil uji t pada variabel stunting (X2) diperoleh t hitung sebesar 4.088487 > t tabel yaitu 2.0738 dan nilai sig. 0.0009 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Stunting (X2) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Hasil Uji Simultan

Tabel 5. Hasil Uji F Simultan

Variable	t-Statistic
R-Squared	0.936655
Adjusted R-Squared	0.908942
S.E. of Regression	0.484120
Sum squared resid	3.749961
Log Likelihood	-11.77882
F-Statistic	33.79798
Prob (F-Statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan nilai F hitung sebesar 33.79798 > F tabel yaitu 3.4668 dan nilai sig. 0.000000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel kemiskinan (X1) dan Stunting (X2) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variable	t-Statistic
R-Squared	0.936655
Adjusted R-Squared	0.908942
S.E. of Regression	0.484120
Sum squared resid	3.749961
Log Likelihood	-11.77882
F-Statistic	33.79798
Prob (F-Statistic)	0.000000

Hasil diatas, nilai Adjusted R Square sebesar 0.908942 atau 90.8942% yang artinya menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri kemiskinan dan stunting berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 90.8942%, sedangkan 9.1058% (100 – nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Discussion

1. Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, selama periode 2018 hingga 2023 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat tercatat sebesar 65,10, dan meningkat menjadi 69,80 pada tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan dari sekitar 11,70% menjadi 10,71% pada tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan kemiskinan terhadap IPM, dengan nilai t hitung sebesar 3,491907 dan nilai signifikansi 0,0030. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kemiskinan berdampak langsung pada peningkatan IPM di Sulawesi Barat.

2. Pengaruh Prevalensi Stunting terhadap IPM

Selain kemiskinan, stunting juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia di provinsi ini. Secara umum stunting berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, sehingga menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas masyarakat di masa depan. Hasil penelitian juga menguatkan hal ini dengan nilai t hitung untuk variabel stunting sebesar 4,088487 dan nilai signifikansi 0,0009, yang menegaskan pengaruh signifikan stunting terhadap IPM. Oleh karena itu, intervensi kesehatan dan gizi anak menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan IPM.

3. Pengaruh Kemiskinan dan Prevalensi Stuntung terhadap IPM

Ketika kedua variabel ini dianalisis secara bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan stunting memiliki pengaruh simultan yang sangat signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai F hitung sebesar 33,79798 dan nilai signifikansi mendekati nol. Ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan upaya pencegahan stunting tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus dilakukan secara terpadu agar dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara optimal di Sulawesi Barat. Kebijakan yang menyasar kedua aspek ini secara simultan akan lebih efektif dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat pada periode 2018–2023. Perubahan tingkat kemiskinan secara langsung berdampak pada peningkatan maupun penurunan IPM di wilayah tersebut. Program-program sosial yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perlu diperluas dan diperkuat agar dampak positifnya dapat lebih dirasakan secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra

& Sitohang, 2024), yang menunjukkan pengaruh signifikan kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, variabel stunting juga terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat selama periode yang sama. Penurunan tingkat stunting berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebaliknya, tingkat stunting yang tinggi memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Intervensi untuk menurunkan angka stunting juga harus menjadi perhatian utama, khususnya melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan gizi yang cukup, serta edukasi mengenai pola asuh yang sehat. Sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial sangat penting untuk memastikan intervensi yang efektif dalam menurunkan prevalensi stunting. Hasil ini konsisten dengan temuan yang disampaikan oleh (Ningsih & Ekaputri, 2024), yang mengidentifikasi pengaruh negatif prevalensi stunting terhadap IPM di negara-negara Asia Tenggara.

Variabel kemiskinan dan stunting secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat pada periode 2018–2023. Kedua faktor tersebut tidak hanya berperan secara individual, tetapi secara kolektif memberikan dampak yang substansial terhadap kualitas pembangunan manusia di provinsi ini. Perubahan bersama pada tingkat kemiskinan dan stunting dapat secara nyata memengaruhi dinamika peningkatan maupun penurunan IPM. Temuan ini mendukung hasil penelitian (Oktaviani et al., 2024), yang menunjukkan bahwa secara simultan kemiskinan dan prevalensi stunting berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan upaya pengentasan kemiskinan sebagai strategi utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial bersyarat, serta Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang mendukung pelatihan dan modal usaha mikro, perlu diperluas dan dioptimalkan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan program PKH di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Jawa Timur dan Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa bantuan sosial yang terintegrasi dengan edukasi kesehatan dan pendidikan dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan .

Selain itu, intervensi pencegahan stunting harus menjadi fokus utama dengan memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Contoh program yang terbukti efektif adalah program "Gizi Ibu dan Anak" yang diimplementasikan melalui posyandu serta program suplementasi gizi dan edukasi pola asuh. Program penurunan stunting yang berhasil di Provinsi Jawa Barat dan Bali, melalui sinergi antara dinas kesehatan dan organisasi masyarakat, dapat menjadi model untuk diterapkan di Sulawesi Barat. Pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pangan terbukti mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.

REFERENCES

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html

BM Lukita, G., & Bonanio, R. K. (2023). Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Masih Terkendala. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/kemiskinan-ekstrem-masih-tinggi

Dja'far, H. I., Suprapto, H. A., & Pamungkas, A. D. (2024). Layanan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Bumdes Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(3), 1736–1747. https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4636

Hairunis, M. N., Salimo, H., & Dewi, Y. L. R. (2018). Hubungan Status Gizi dan Stimulasi Tumbuh Kembang dengan Perkembangan Balita. *Sari Pediatri*, *20*(3), 146. https://doi.org/10.14238/sp20.3.2018.146-51

Karyati, Y., & Julia, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Stunting di 10 Wilayah Tertinggi Indonesia Tahun 2010-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, *1*(2), 101–108. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.401

Khairunnisa, I., Yusnita, F., Suryani, I. W., & Panorama, M. (2023). Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *7*(3), 1735–1750. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3557

Ningsih, S. A., & Ekaputri, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Prevalensi Stunting, Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara Asia Tenggara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, *13*(12). https://doi.org/https://doi.or10.24843/EEB.2024.v13.i12.p03

Oktaviani, N., Handayani, D., Wati, H., & Zaki. (2024). Pengaruh Kemiskinan dan Prevalensi Stunting terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, *6*(3), 569–574. https://doi.org/10.37034/infeb.v6i3.928

Pamungkas, A. D., Suendarti, M., Alfarisi, S., Habibah, N., & Fatihah, A. (2024). Kemandirian dan Penguatan Ekonomi Melalui Pembuatan Tempe Hygienis Pada Ponpes Daarussalaam Depok. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(5), 8604–8609. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/34497/22882

Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal*

Ekuilnomi, *2*(2), 86–101. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.109

Sari, A. I. C., A'ini, Z. F., & Tukiran, M. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *9*(2), 127. https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.15082

Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, *6*(2), 184–204. https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1 ed.). Alfabeta.

Syahputra, M. A., & Sitohang, A. C. (2024). PENGARUH KEMISKINAN, STUNTING TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2023. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, *4*(01), 74–79. https://doi.org/10.69957/grjb.v4i01.1635

Terisha, F., Melvin, Owen, Sahara, P., & Sadrakh, R. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi di Indonesia Periode 2011-2021. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *2*(1), 52–57. https://doi.org/10.56127/jekma.v2i1.435